

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Anwar (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Papua”. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Serta mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan model regresi berganda dengan data panel selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Papua, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Adapun keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini merupakan perbandingan dari penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini merubah variabel Dana Otonomi Khusus dengan variabel Tenaga Kerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Belanja Modal,

Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Penelitian Kristina (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016)”. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perkembangan dari pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Serta melihat pengaruh dari pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel selama kurun waktu enam tahun yaitu dari tahun 2011-2016. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, Indeks pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan, Tenaga Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2011-2016. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa kemampuan variabel pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan. Adapun keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini merupakan perbandingan dari penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini merubah variabel indeks pembangunan manusia dan iflasi dengan variabel investasi dan angkatan kerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja dan

Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Penelitian Daniar (2015) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal dan tenaga kerja terserap terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara parsial dan simultan. Alat analisis yang digunakan yakni metode regresi linier berganda dengan menggunakan data panel dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini secara parsial dan simultan variabel belanja modal dan tenaga kerja terserap berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2013. Adapun keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini menambahkan variabel pendapatan asli daerah. Penelitian ini menganalisis pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah (Adisasmita, 2011).

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah ataupun wilayah dalam periode tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah (Sukirno, 2000).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016)

2. Teori Produksi

Menurut Boediono (1990:42), produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan

mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Orang atau pihak yang melakukan aktivitas produksi disebut produsen.

Menurut Miller dan Meiners (2000) Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, di mana atau kapan komoditi-komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu.

Iswardono (2004) menuliskan bahwa teori produksi sebagaimana teori perilaku konsumen merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif yang tersedia. Dalam hal ini adalah keputusan yang diambil seorang produsen untuk menentukan pilihan atas alternatif tersebut. Produsen mencoba memaksimalkan produksi yang bisa dicapai dengan suatu kendala ongkos tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimum.

3. Fungsi Produksi

Menurut Soekartawi (1990) Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak diminati dan dianggap penting karena:

- a. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti.

- b. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan (Y), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antar variabel penjelasnya (antara X dengan X yang lain).

Secara matematis sebuah fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n)$$

Keterangan:

Y = *Output* atau hasil produksi

X = *Input* atau faktor produksi

i,n = Faktor produksi ke-i, ke-n

Berdasarkan fungsi produksi seperti tersebut, maka hubungan Y dan X dapat diketahui dan sekaligus hubungan $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$ lainnya juga dapat diketahui (Soekartawi, 1990 dalam Jaza 2014). Model pengukuran efisiensi berbeda-beda tergantung dari model yang dipakai. Umumnya ada dua model yang biasa dipakai, yaitu model fungsi produksi dan model *linear programming* (Soekartawi, 1991 dalam Jaza 2014). Model fungsi produksi dapat dirumuskan dengan berbagai macam, Semaon (1992) dalam Jaza (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa contoh fungsi produksi seperti fungsi produksi Mitcherlich-Spillman, fungsi produksi linear, fungsi produksi Cobb-Douglas, fungsi produksi *Constant Elasticity of Substitution* (CES), fungsi produksi transdesental, dan fungsi produksi translog. Soekartawi (1990) dalam Jaza (2014) menjelaskan bahwa fungsi Cobb-Douglas merupakan salah satu model fungsi produksi yang umum digunakan untuk

menjelaskan hubungan antara produksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi Cobb-Douglas adalah satu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, variabel yang satu disebut dengan variabel *dependent*, yang dijelaskan (Y) dan yang lain disebut variabel *independent*, yang menjelaskan (X). Penyelesaian hubungan antara Y dan X biasanya dengan cara regresi yang pada akhirnya ditunjukkan variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah-kaidah pada regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas. Rasmussen (2011) dalam Jaza (2014) menjelaskan secara matematis, fungsi Cobb-Douglas dengan dua *input* produksi dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} e^u$$

Soekartawi (2002) menjelaskan apabila ditulis dalam bentuk linear logaritmik persamaan Cobb-Douglas dapat dituliskan kembali dalam bentuk sebagai berikut:

$$\ln Y = \ln \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + u$$

Keterangan:

Y = variabel yang dijelaskan

X = variabel yang menjelaskan

α, β = besaran yang akan diduga

u = kesalahan (*distrubance term*)

e = logaritma natural; e = 2,718

Persamaan di atas dapat dengan mudah diselesaikan dengan cara regresi berganda. Penggunaan fungsi Cobb-Douglas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain, karena perhitungannya yang sederhana dan dapat ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear.
- b. koefisien pengkat dari masing-masing fungsi produksi Cobb-Douglas sekaligus menunjukkan besarnya elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi yang digunakan terhadap hasil produksi.
- c. jumlah elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi yang diduga sekaligus merupakan pendugaan terhadap skala usaha dari proses produksi yang berlangsung.
- d. bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas paling banyak digunakan dalam penelitian khususnya penelitian bidang pertanian (Soekartawi, 1990 dalam Jaza, 2014).

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas antara lain:

- a. Tidak ada pengamatan variabel penjelas (X) yang sama dengan 0, sebab logaritma dari nol adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui (*infinite*).
- b. Dalam fungsi produksi diasumsikan tidak terdapat perbedaan teknologi pada setiap pengamatan (*non neutral difference in the respective technologies*). Dalam arti bahwa kalau fungsi produksi Cobb-Douglas

yang dipakai sebagai model dalam suatu pengamatan dan bila diperlukan analisis yang memerlukan lebih dari 1 model maka perbedaan model tersebut terletak pada *intercept* dan bukan pada kemiringan garis (*slope*) model tersebut.

- c. Tiap variabel X adalah *perfect competition*.
- d. Perbedaan lokasi seperti iklim sudah tercakup pada faktor kesalahan
- e. Hanya terdapat satu variabel yang dijelaskan yaitu (Y).

Penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas tentunya memiliki beberapa batasan dalam analisis dan perhitungannya. Fungsi Produksi Cobb-Douglas memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. bias terhadap variabel manajemen.
- b. asumsi bahwa teknologi dianggap netral atau sama, padahal belum tentu teknologi didaerah penelitian adalah sama.
- c. Model fungsi produksi Cobb-Douglas tidak dapat digunakan untuk menduga tingkat produksi pada taraf penggunaan faktor produksi sama dengan nol, karena logaritma dari nol adalah bilangan yang tidak diketahui besarnya (*infinite*).
- d. Sering terjadi multikolinear (Rassmussen 2011; Soekartawi 1990; Soekartawi 2002).

4. Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari

dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Menurut Halim (2013) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang memanfaatkannya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin.

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan yang sah.

Abdullah (2008) juga menjelaskan bahwa belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*). Dana bantuan pemerintah yang selalu dialokasikan untuk membiayai Belanja Modal adalah Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

5. Hubungan Belanja Modal Terhadap PDRB

Menurut Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada Produk Domestik Regional Bruto. Dengan kata lain apabila jumlah belanja modal meningkat maka akan meningkatkan jumlah produk domestik regional bruto. Penelitan Adi (2007) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Salah satunya yakni belanja modal dengan melakukan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengundang hadirnya investor. Dengan demikian, diharapkan belanja yang dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang peningkatan jumlah Produk Domestik Regional Bruto.

6. Tenaga Kerja

Menurut Suparmoko (2002) tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yaitu pada usia 15-64 tahun. Adapun penduduk usia kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja merupakan penduduk yang bekerja dan masih mencari kerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang masih seola, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan yang menerima pendapatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sejak tahun

1998, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan usia 15 tahun keatas sebagai kelompok penduduk usia kerja.

Menurut Subri (2002) menyatakan, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

7. Hubungan Tenaga Kerja Terhadap PDRB

Menurut Nicholson (1991) mengemukakan bahwa jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah produk domestik regional bruto, dengan kata lain apabila tenaga kerja meningkat maka jumlah output dari produksi barang dan atau jasa yang dihasilkan akan meningkatkan sehingga akan meningkatkan jumlah produk domestik regional bruto. Menurut Kuncoro, (2004) mengemukakan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah produk domestik regional bruto. Dengan kata lain jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar tenaga kerja yang bekerja, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah sehingga akan meningkatkan jumlah produk domestik regional bruto.

8. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2013) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,

Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh individu yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembangunan yang ada di daerah (Yani, 2002). Adapun Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pajak Daerah tingkat I (Provinsi)

Pajak tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

2) Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten atau Kota)

Pajak tersebut terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan parkir (Yani, 2002).

b. Retribusin Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan kepada negara dimana individu atau badan yang menggunakan jasa-jasa negara, yang artinya sebagai pembayaran atas pemakaian jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta (Panggabean, 2010).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33 Tahun 2004):

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) Jasa Giro,
- 3) Pendapatan bunga,
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 8) Pendapatan denda pajak,
- 9) Pendapatan denda retribusi,

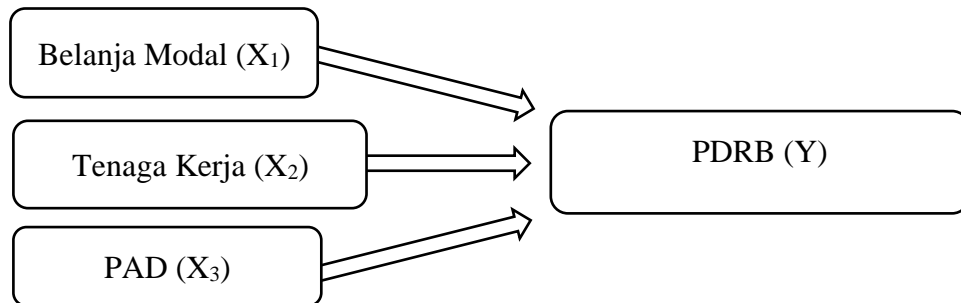
- 10) Pendapata hasil eksekusi atas jaminan,
- 11) Pendapatan dari pengembalian,
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran.

9. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB

Menurut Harianto (2007) peningkatan jumlah pendapatan asli daerah akan meningkatkan jumlah produk domestik regional bruto. Dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, apabila PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga peluang untuk meningkatkan kemandirian daerah akan lebih besar, dari adanya dampak tersebut maka pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah dan meningkatkan jumlah produk barang dan atau jasa. Hasil dari pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan jumlah produk domestik regional bruto.

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan utama di daerah yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan jumlah produk domestik regional bruto.

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

H. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian tinjauan penelitian terdahulu serta teori dan kajian pustaka diatas yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis: “Diduga variabel Belanja Modal, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto”.